

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Public Relations atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hubungan masyarakat (humas) sudah tidak asing lagi bagi kita. Humas telah menjadi “*trend*” *manajemen modern* dengan berbagai istilahnya. Hal ini bisa dilihat dari dibentuknya bagian atau divisi humas dalam banyak perusahaan, profit maupun non profit *trend* humas juga hadir dalam alternative profesi yang dipilih oleh para professional lain, misalnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai memiliki alat kelengkapan yang di sebut hubungan masyarakat.

Bidang profesi hubungan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren. Kehadiran humas DPRD Kabupaten Sinjai di butuhkan karena humas merupakan salah satu elemen yang yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Humas merupakan aktivitas komunikasi dua arah dengan *public* (perusahaan/organisasi) yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya dan saling membantu/kerja sama.

Eksistensi hubungan masyarakat DPRD Kabupaten Sinjai merupakan keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas kepada masyarakat. Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran

humas bukan merupakan unit struktural yang kaku karena diikat oleh prosedur dan birokrasi yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas Humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai pelayan publik pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan menerima informasi dari publiknya serta mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat.

Sehingga sebagai pimpinan organisasi atau praktisi PR mamahami aspirasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting terutama upaya memperoleh informasi tentang kebutuhan dan harapan publik yang nyata, agar dapat membuat suatu kebijakan pimpinan yang dapat memuaskan publik.

Penelitian Terdahulu Yang Dilakukan Oleh J. W. Londa (2014) Yang Berjudul Peran Petugas Humas Sebagai Komunikator Pembangunan (Studi Di Bagian Humas Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan). Hasil penelitian mengatakan bahwa Peran humas sebagai komuikator pembangunan sebenarnya sudah berjalan dengan semestinya, baik itu sebagai jembatan dari masyarakat kepada pemerintah, maupun dari pemerintah terhadap masyarakat. Namun, Humas masih kurang dengan kegiatan terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana setiap masukan masyarakat soal pembangunan di Minsel, karena yang terjadi Humas kebanyakan hanya mengetahui komplein publik dari Media Massa.

Seseorang petugas humas harus benar-benar berperan dalam memberikan informasi, meyakinkan, mendidik, hingga membuat masyarakat atau pihak yang bersangkutan tertarik dan percaya terhadap keberadaan dan tujuan organisasi atau lembaga tersebut.

Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/ 08/TAHUN 2007 pasal 6 tentang pedoman hubungan masyarakat di instansi pemerintah di sebutkan bahwa fungsi humas pemerintah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, pemberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.¹

¹ Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/ 08/TAHUN 2007 tentang pedoman hubungan masyarakat di instansi pemerintah

² Hartini, Kadarsih, & Sudrajat. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 38

Pegawai Humas sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan informasi terhadap masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Hartini, Kadarsih, & Sudrajat mengemukakan bahwa “Pegawai negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara”.² Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara. Tujuan dari praktisi PR dalam menjalankan perannya adalah untuk menciptakan hubungan harmonis, saling pengertian, saling percaya dan image yang baik.

Tingginya tuntutan masyarakat akan pemenuhan informasi, dan kritisnya masyarakat dalam menyikapi isu di pemerintahan, menjadi alasan instansi pemerintahan seperti DPRD membutuhkan peran humas dalam pelayanan masyarakat. Seorang humas di pemerintahan dituntut untuk membangun dan mempertahankan image positif serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun media. Namun yang terjadi adalah Humas DPRD Kabupaten Sinjai sebagai mediator belum mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga berkembang persepsi negatif di mata masyarakat.

Dimana tugas humas di DPRD Kabupaten Sinjai yaitu menyiapkan dan menyusun informasi/ bahan publikasi hasil kegiatan sekretariat DPRD, menyusun dokumentasi hasil kegiatan sekretariat DPRD, menghimpun aspirasi dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan kebijakan pimpinan Sekretariat DPRD, berita yang mengenai kegiatan anggota dewan atau berhubungan langsung dengan DPRD Kabupaten Sinjai dirangkum dalam bentuk kliping, dianalisa isi beritanya, selanjutnya dikonsultasikan dengan komisi yang terkait.³

3 Data Kantor DPRD Kabupaten Sinjai

Humas DPRD Kabupaten Sinjai hanya memiliki jumlah pegawai sebanyak 8 orang yang terdiri dari 2 orang Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan 7 orang tenaga honorer 1 PNS sebagai anggota, dan tidak memiliki wartawan sehingga apabila ada berita dari masyarakat luar masih lambat untuk diketahui, juga kurangnya sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masih sulit dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 4 Januari 2016 pada kantor DPRD Kabupaten Sinjai khususnya bagian humas terlihat bahwa sebagian pegawai sering terlambat masuk kerja dan fasilitas kerja yang kurang memadai sehingga beberapa pekerjaan tidak terselesaikan tepat waktu.

Pemaparan diatas sudah terjadi selisih antara espektasi dan realita, dimana Humas seharusnya menjalankan peran sesuai fungsinya. Sebagaimana latar belakang permasalahan penulis melakukan penelitian dengan Judul *"Peranan Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Pelayanan Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat di merumuskan beberapa Rumusan Masalah, yaitu Bagaimana Peranan Humas sebagai dalam pelayanan publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.

C. Tujuan Penelitian

Berdaskan rumusan masalah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Humas dalam Pelayanan Publik di Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya referensi pengetahuan tentang Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan pertimbangan selanjutnya untuk humas agar lebih baik lagi.

- b. Kegunaan Praktis, Proposal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyempurnakan Peran Humas dalam pelayanan *publik* di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai